




ບົຍນິຊຸງ ງຽບບິຊຸນິ ຕາຍິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ດິກສິບິບຸງຕາຍິ
DINAS PERHUBUNGAN

ຕາຍິ ສາຍິ ງາຍາຍິ ບາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ (ບາຍິ ງາຍິ)
 JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),

ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ (ບາຍິ ງາຍິ) ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ ງາຍິ
 Telepon (0361) 224436, 227730 Laman : dishub.baliprov.go.id Pos-el : dishub@baliprov.go.id

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | B.16.000/250/SEKRET/DISHUB |
| Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2026 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 2 Januari 2026 |
| Disahkan Oleh |  KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI, <u>I KADEK MUDARTA, ST., M.A.B</u> NIP. 19750218 200802 1 001 |
| Nama SOP | KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK |

Kualifikasi Pelaksana

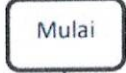


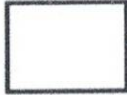
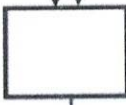

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;

1. Mampu berkoordinasi dengan tim dan integritas yang tinggi
2. Mempunyai kemampuan mengklasifikasi Daftar Informasi Publik

| | |
|---|--|
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu 3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 4. Pemohon informasi 5. PPID Utama dan PPID Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> • Lembar Kerja dan Rencana Kerja • Term of Reference • Jaringan Internet • Komputer dan Printer |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Apabila DIDP tidak tersusun sesuai target dan di umumkan ke publik maka akan ada pengajuan Keberatan Informasi dari Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Disimpan sebagai data elektronik dan manual |

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing OPD di Pemerintah Provinsi Bali, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. |  | | | Draf DIDP | Secara berkala, serta merta dan setiap saat | DIDP yang telah dikumpulkan dari OPD | |
| 2. | Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. | |  |  | DIDP yang telah dikumpulkan dari OPD | Secara berkala, serta merta dan setiap saat | DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya | |
| 3. | Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. | |  | | 1. Komputer 2. DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya | Secara berkala, serta merta dan setiap saat | DIDP yang sudah diklasifikasi dan siap untuk disahkan. | |
| 4. | Menetapkan DIDP secara resmi. | | |   | 1. Komputer 2. DIDP yang sudah diklasifikasi dan siap untuk disahkan. | 120 menit | Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID | 1. Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIDP 2. Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan |